

Analisis Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia tentang Ideologi Pendidikan Nasional

Karti Soeharto

Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi: Kampus UNESA Lidah Wetan Surabaya. Email: karti_unesa@yahoo.com

Abstract: This article focuses on the interpretation of Indonesian education elites on the education ideology represented in the politics of education which takes the form of National Education System Bill Number 20 Year 2003. It is based on a research which concerned a couple of questions: 1) how did Indonesian education elites interpret the foundation, curriculum and management of national education? 2) is Indonesian ideology of education categorized in O'Neill's education ideology theory, and why? The research used two main theories: (1) O'Neill's education ideology theory and Nelson dialectic theory, and (2) Putnam theory on elite identification. There were ten informants in the research, and the data collected was in the form of statute documents and interview transcripts. Individual analysis unit used human instrument. The data were analyzed using Strauss and Corbin model. The research resulted in two main findings. First, based on the interpretation of Indonesian education elites, the foundation, curriculum and management of national education were considered to have the characteristics of both social conservative ideology and liberal ideology. Second, based on the strategic interpretation and positional cluster of Indonesian educational elites, Indonesian educational ideology could be categorized into conservative ideology, while based on the non strategic interpretation and reputation cluster, the ideology could be included in compromistic liberal ideology.

Kata kunci: politik pendidikan, elite pendidikan, ideologi pendidikan konservatif sosial, ideologi pendidikan liberal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh enam hal yang mendasar. Pertama, berangkat dari perdebatan antara perspektif sistem formal dan pespektif proses atau problematis. Pertikaian perspektif yang terjadi sejak tahun 1960-an itu masih berkecamuk sampai sekarang. Perspektif sistem formal yang menerapkan sistem filsafat umum ke dalam bidang pendidikan menguasai kajian ideologi pendidikan sejak 1950-an (Butler, 1951; Brameld, 1955, 1961) Sedangkan perspektif proses atau problematis dengan metode semantis, rasional, dan empiris, melakukan penolakan terhadap perspektif sistem formal sejak 1960-an (Brubacher, 1962; Scheffter, 1965; Scoltis, 1966a, 1966b, 1968; Peters, 1966); kedua, perdebatan konsepsi tentang klasifikasi ideologi pendidikan, di antaranya tokoh-tokoh seperti Brubacher (1962), O'Neill (1981), Freire, dkk., (2003), dan Giroux & McLaren (1989); ketiga, adanya sejumlah problematika pendi-

dikan Indonesia yang berimplikasi pada ideologi pendidikan; keempat kelangkaan kajian ideologi pendidikan Indonesia, kelima adanya pro-kontra Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan keenam, adanya tumpuan harapan terhadap elite pendidikan Indonesia.

Fokus kajian penelitian ini adalah mengenai interpretasi elite pendidikan Indonesia terhadap ideologi pendidikan nasional yang direpresentasikan melalui politik pendidikan sebagaimana tertuang dalam produk politik berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tiga komponen pendidikan: landasan pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan. Manfaat penelitian ini menghasilkan pemahaman, konsep-konsep, dan proposisi-proposisi tentang ideologi pendidikan nasional, yang secara teoretis dapat dipergunakan untuk merevisi teori tentang ideologi pendidikan O'Neill dan

Nelson, dan secara praktis, hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk pertimbangan para elite pendidikan dalam penerapan ideologi pendidikan nasional, dan untuk mengisi kelangkaan kajian tentang ideologi pendidikan di Indonesia.

Konsep Ideologi dan Ideologi Pendidikan

Shils, Lane, dan Erikson, berpendapat bahwa *Ideologies are sets of beliefs that enable people to explain and justify a society they would prefer. An Ideology includes assumptions about the nature and purpose of society and the related nature of individuals (Shils, 1968); it provides criteria against which one can judge human life and society (Lane, 1962); and it provides a means for self-identification (Erikson, 1960)*

Bagaimana terapannya dalam bidang pendidikan? Christenson dkk. menyatakan bahwa: *Ideologies are basic rationales for divergent educational views to either sustain, alter, or overthrow the contemporary school. (Christenson et al., 1971). Each ideology also provides grounds for unity around its beliefs. Thus traditionalist share a general view that schools ought to follow time-honored ideas, practices, and authorities from a previous golden age education. Progresivists share a different view-that schools must be flexible, child-centred, and contemporary. Radical educational ideologies from both the right and left wing (e.g. liberationists, reconstructionists, abolitionists, and extreme eliteists or egalitarians) provide their views of schooling, from advocating the abolition of public schools to espousing the use of the schools for social criticism and the overthrow of oppressors.*

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu ideologi pendidikan bersifat dinamis, niscaya mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan keragaman. Meskipun ideologi beroperasi dalam bentuk jamak, tetapi suatu ideologi memiliki misi utama yang sama, yaitu diniatkan untuk ‘memanusiakan manusia’ (Kant dalam Danim, 2003; Freire, Fromm dan Illich, 2003).

Elite Pendidikan dan Interpretasi Ideologi melalui Analisis Wacana

Teori elite yang digunakan dalam kajian ini adalah teori analisis elite Robert D. Putnam, meliputi a-

nalisis posisional dan reputasional serta analisis keputusan strategis dan nonstrategis. Teori analisis elite Robert D. Putnam memberi jalan untuk mengidentifikasi elite pendidikan yang diperlukan untuk menginterpretasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Teori wacana dalam ilmu sosial berkembang berkat pemikiran Louis Althusser dengan konsepnya mengenai ideologi, Antonio Gramsci dengan konsepnya mengenai hegemoni, dan Michel Foucault dengan konsepnya mengenai formasi wacana. Pada pihak lain, dalam model analisis terdapat sumbangan besar dari Roger Fowler, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. van Dijk, dan Norman Fairclough. Fairclough (1992) yang menyatakan bahwa wacana termanifestasi melalui berbagai bentuk khusus yaitu dengan penggunaan bahasa dan simbol yang lain. Oleh karena itu, wacana tidak dapat dilihat hanya sebagai representasi entitas dan hubungan sosial, melainkan sebagai sebuah konstruksi.

Berdasarkan batasan dan pengertian di atas, Eriyanto (2001) menyarikan pandangan Teun A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak sebagai karakteristik penting dari analisis wacana. Karakteristik penting itu meliputi: (1) wacana sebagai tindakan, (2) konteks sosial wacana, (3) konteks historis wacana, (4) pertarungan kekuasaan dalam wacana, dan (5) wacana sebagai praktik ideologi.

Rumpun Ideologi Pendidikan Konservatif

Ada sejumlah aliran dalam rumpun ideologi pendidikan konservatif yang secara substantif memiliki kemiripan dalam menginterpretasi pendidikan. Aliran-aliran yang dimaksudkan adalah fundamentalisme, perenialisme, esensialisme, intelektualisme, dan fungsionalisme. O’Neill menyatakan: *The Conservative educational ideologies consist of three basic tradition-educational fundamentalism, educational intellectualism, and educational conservatism. They range from the religious expression of educational fundamentalism, at the most conservative or authoritarian end of the spectrum, to the secular variety of educational conservatism, at the least conservative end (O’Neill, 1981:62).*

Istilah ideologi konservatif dikemukakan oleh Henry Giroux & Aronowitz (1993) dan O’Neill (1981), sedangkan Brameld menggunakan sebutan perenialisme dan esensialisme, kemudian Freire (1999) menggunakan sebutan kesadaran magis

(*magical consciousness*). Giroux & Aronowitz (1993) dan Giroux & MacLaren (1989) menyatakan bahwa ideologi konservatif berkeyakinan bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan hukum alam. Ideologi konservatif, selain memiliki kemiripan interpretasi dengan kesadaran magis, juga memiliki kemiripan dengan perenialisme, esensialisme, fundamentalisme, dan intelektualisme. Perenialisme berpandangan bahwa sasaran yang pantas dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai yang abadi, tak terikat ruang. Perenialisme berakar pada tradisi filosofi yang bisa dilacak kembali ke filosofi Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas, yang mengajukan pandangan bahwa keberadaan pola-pola tidak bisa berubah dan bersifat universal, yang melatari dan menentukan seluruh objek serta peristiwa yang ada dalam kenyataan. Cara pandang budaya menyeluruh dalam perenialisme bersifat mundur (regresif); ia berusaha memulihkan tolok ukur mutlak yang mengatur dunia zaman kuno dan zaman pertengahan, dan mengandung sifat menentang demokrasi yang murni (O'Neill, 1981).

Bagi seorang esensialis, sasaran utama pendidikan adalah untuk mengenalkan siswa kepada karakter dasar alam semesta yang tertata itu, dengan cara mengenalkan mereka pada warisan budaya, yang berkembang semasa zaman pencerahan dan kebangkitan kembali (*renaissance*) dan mencapai puncaknya di pertengahan abad 19 (O'Neill, 1981 dan Freire, 2004).

Fundamentalisme memiliki kemiripan dengan konservatisme, yang pada dasarnya cenderung meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan/atau intelektual, serta mendasarkan anggapan-anggapannya di atas kebenaran yang diwahyukan ataupun kesepakatan sosial yang sudah mapan (akal sehat).

Ideologi pendidikan intelektualisme lahir dari ungkapan-ungkapan konservatisme yang didasari oleh pemikiran filosofis atau teologis yang relatif kaku dan secara fundamental bersifat otoritarian. Secara umum, konservatisme filosofis dimaksudkan untuk mengubah praktik-praktik politik yang ada, dan menjadikannya lebih sempurna berlandaskan cita-cita dan gagasan intelektual atau kerohanian ideal yang pada intinya bersifat dimutlakkan.

Durkheim berpandangan bahwa fungsi utama pendidikan adalah menransmisikan norma dan nilai-

nilai masyarakat. Masyarakat akan tetap hidup jika keberadaan anggota-anggotanya pada tingkat yang cukup homogen. Pendidikan terus-menerus mengesalkan dan memperkuat homogenitas dengan mengatur anak sejak awal dengan kesamaan-kesamaan esensial dalam kebutuhan-kebutuhan kehidupan kolektif (Haralambos & Holborn, 2000). Terkait dengan kurikulum pendidikan, Durkheim memberikan ilustrasi tentang pendidikan yang ada di Amerika. Kurikulum pendidikan pada umumnya membantu menanamkan norma-norma dan nilai-nilai kepada masyarakat dalam berbagai latar belakang, melalui bahasa dan sejarah umum untuk para emigran dari berbagai negara di Eropa. Siswa-siswa Amerika belajar tentang *founding fathers* dan konstitusi.

Talcott Parsons adalah sosiolog fungsionalis dari Amerika, membuat garis-garis besar tentang pandangan fungsionalis mengenai pendidikan, khususnya *education and universalistic values*. Dalam tulisannya pada akhir tahun 1950-an memberikan argumentasi bahwa *after primary socialization within the family, the school take over as the focal socializing agency: school acts as a bridge between the family and society as a whole, preparing children for their adult role. Within the family, the child is judged and treated largely in terms of particularistic standards. Parents treat the child as their particular child rather than judging her or him in terms of standards or yardsticks that can be applied to every individual* (Haralambos & Holborn, 1981:779). Parsons berargumen bahwa sekolah merupakan representasi masyarakat dalam bentuk mini (*the school represents society in miniature*). Masyarakat industrial modern berkembang berdasarkan pada kemampuan atas *universalistic standard* daripada *particularistic standard*, atas *meritocratic principles* yang berlaku bagi semua anggota.

Rumpun Ideologi Pendidikan Liberal

O'Neill (O'Neill, 1981:66) mengatakan bahwa *"The liberal educational ideologies, like the conservative, consists of three basic traditions-educational liberalism, educational liberationism, and educational anarchism. They range from the least liberal expression of educational liberalism (methods liberalism) to the exceedingly radical proposals of the utopian anarchist at the other end of the continuum"*.

John Dewey seorang *educationalist* dan *philosopher* dari Amerika, menyatakan bahwa tugas pendidikan adalah mendorong individu-individu untuk mengembangkan potensinya secara penuh sebagai manusia (*to encourage individuals to develop their full potential as human beings*). Dia menganjurkan metode pengajaran progresif. Siswa harus belajar dari pengalaman *by doing things rather than being told*. Dengan cara demikian, bukan hanya pengetahuan yang mereka peroleh, tetapi juga mengembangkan *the skills, habits, and attitudes necessary for them to solve a wide variety of problems*.

Pandangan-pandangan liberal telah mempengaruhi sejumlah kebijakan pendidikan, di antaranya USA dan Inggris. Pada tahun 1960-an di USA, Lyndon B. Johnson mengatakan "*The answer to all national problems comes down to a single word: education*" (Bowles and Gintis, 1976). Program rancangan khusus tentang pendidikan menjadi kunci utama Johnson dalam memerangi kemiskinan. Di Inggris pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an muncul suatu gerakan yang menuju *progressive child-centred education which was based largely upon liberal principles. Each child was held to be unique, and education was designed to foster equally the talents of each unique individual* (Haralambos & Holborn, 2000:781).

Brameld menggunakan istilah progresivisme atau rekonstruksionisme. Tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis, yaitu untuk membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai problema yang disajikan dalam konteks pengalaman pada umumnya. Karakteristik, progresivitas pendidikan bersifat duniawi, menjelajah, dan aktif. Ini terutama berorientasi kepada cara hidup liberal (dalam budaya Amerika). Secara filosofi, progresivisme ditopang oleh filosofi pragmatisme.

Illich (1973) jauh lebih radikal terhadap perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan. Ia mengambil pandangan liberal untuk konklusi logikanya dengan berdalih bahwa persekolahan tidak penting dan membahayakan untuk masyarakat (*that formal schooling is unnecessary, and indeed harmful to social* [Haralambos & Holborn, 2000:781]). Ideologi liberal radikal juga disebut dengan ideologi kritisisme. Ideologi kritisisme adalah aliran yang diasosiasikan dengan mashab Frankfurt (*Frankfurt School*) yang dimulai dari Jerman (Bottomore, 1984; Held, 1980; Fay, 1975,

dalam O'Neil, 1981), yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Pendidikan harus mampu melakukan refleksi kritis, terhadap '*the dominant ideology*' ke arah transformasi sosial (Haralambos & Holborn, 2000). Dalam perspektif kritis, pendidikan harus memanusiakan manusia, jangan sampai terjadi dehumanisasi, karena sistem dan struktur yang tidak adil.

Pemetaan Ideologi Pendidikan menurut O'Neill

O'Neill (1981) membagi ideologi pendidikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pertama ideologi konservatif, meliputi ideologi pendidikan fundamentalisme, ideologi pendidikan intelektualisme, dan ideologi pendidikan konservatisme; kedua ideologi liberal, meliputi ideologi pendidikan liberalisme, ideologi pendidikan liberationisme, dan ideologi pendidikan anarkisme.

Fundamentalisme meliputi corak-corak konservatisme, yang pada dasarnya bersifat anti-intelektual dalam arti mereka ingin meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan/atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan anggapan-anggapannya di atas penerimaan yang relatif tidak kritis terhadap kebenaran yang diwahyukan ataupun kesepakatan sosial yang sudah mapan (akal sehat). Ada dua variasi sudut pandang dalam penerapannya ke dalam pendidikan yaitu ideologi pendidikan fundamentalisme religius, dan ideologi pendidikan fundamentalisme akal sehat.

Ideologi pendidikan intelektualisme lahir dari ungkapan-ungkapan konservatisme politis yang didasari oleh sistem-sistem pemikiran filosofis atau teologis yang relatif kaku dan fundamentalis otoritarian. Secara umum, konservatisme filosofis bermaksud mengubah praktik-praktik politik yang ada, dan menjadikannya lebih sempurna relevan dengan cita-cita dan gagasan intelektual atau kerohanian ideal, yang pada intinya bersifat dimutlakan.

Ideologi pendidikan konservatisme, pada dasarnya mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu, disertai dengan rasa hormat yang mendalam terhadap hukum serta tatanan sosial yang baku, sebagai landasan bagi perubahan sosial yang konstruktif. Dalam hal pendidikan, kaum konservatif menganggap bahwa sasaran utama sekolah adalah pelestarian dan penerusan struktur dan sistem sosial serta pola-pola berikut tradisi-tradisi yang sudah mapan. Ada dua

variasi mendasar di dalam ideologi pendidikan konservatisme yaitu ideologi pendidikan konservatisme religius, dan ideologi pendidikan konservatisme sekular (O'Neill, 1981: 64).

Ideologi pendidikan liberal bertujuan untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada, dengan cara membelajarkan setiap siswa sebagaimana caranya menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya sendiri secara efektif. Ideologi pendidikan liberal ini berbeda-beda dalam hal intensitasnya, dari yang relatif lunak, yakni liberalisme metodik ke liberalisme direktif hingga ke liberalisme non direktif atau *liberalisme laissez faire* (O'Neill, 1981:66).

Ideologi Pendidikan liberasionisme menganggap bahwa manusia mesti mengusahakan pembaruan/pembarukan segera dalam ruang lingkup besar atas tatanan politis yang ada, sebagai jalan menuju perluasan kebebasan individual serta untuk mempromosikan perwujudan potensi-potensi personal sepenuhnya. Ideologi pendidikan liberasionisme mencakup spektrum pandangan yang luas, dari liberasionisme pembaruan yang relatif konservatif, ke liberasionisme revolusioner. Bagi kaum liberasionisme, sekolah haruslah objektif (rasional-ilmiah), namun tidak sentralistik, dan memiliki fungsi ideologis.

Ideologi pendidikan anarkisme, bersudut pandang pembela penghapusan/pemusnahan/pelenyapan seluruh kekangan terlembaga atas kebebasan manusia. Penghapusan kekangan ini diyakini sebagai jalan untuk menyediakan peluang penuh atas potensi-potensi manusia yang dibebaskan. Dalam pendidikan, sikap anarkis paling terwakili dalam tulisan-tulisan tokoh terkenal Ivan Illich dan Paul Goodman (O'Neill, 2002:113). Kaum yang berideologi pendidikan anarkisme, sebagaimana yang liberalis dan liberasionis, pada umumnya menaati sebuah sistem penyelidikan eksperimental yang terbuka (ilmiah-rasional).

Analisis Nelson, dkk. tentang Sistem Pendidikan

Pendekatan dialektik Nelson berangkat dari pandangan bahwa sekolah tidak hanya sebagai pusat perselisihan, tetapi sekolah juga sebagai tempat yang logis untuk studi perselisihan yang bijaksana (Nelson, dkk., 1996). Pendekatan dialektik ini memiliki kerangka pikir sederhana, jelas, dan relevan untuk menemukan isu-isu penting dan berupaya memperoleh ide yang lebih baik. Dengan kelebihan itu, maka pendekatan

an dialektika ini dipergunakan untuk memahami interpretasi elite pendidikan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemikiran cara dialektik menyarankan suatu dialog antar gagasan yang bersaing, tidak mengalahkan yang satu dan menerima lainnya, tetapi untuk mempertemukan suatu gagasan yang teruji. Roth (dalam Nelson dkk., 1996:20) memberikan catatan bahwa studi dialektika tentang isu-isu pendidikan dapat menawarkan *enlightenment for social improvement and support for reflective teachers*.

Nelson, dkk. (1996:27) menggunakan kerangka pikir berfokus pada 3 (tiga) pertanyaan utama tentang pendidikan, yakni pertama *what interests should schools serve?* Kedua *what should be taught?* Ketiga *How should schools be organized and operated?* Pertanyaan dasar pertama itu mengimplikasikan komponen landasan pendidikan. Pertanyaan kedua memberi implikasi pada komponen kurikulum pendidikan dan pertanyaan dasar ketiga mengimplikasikan komponen manajemen pendidikan. Ketiga komponen pendidikan itulah yang menjadi inti gagasan Nelson, dkk. (1996) untuk mengkaji isu-isu pendidikan melalui pendekatan dialektikanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan perspektif proses. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dialektik Nelson dkk (1996) yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada data empiris, analisis logis, rasional, dan semantis-kemaknaan atas interpretasi elite pendidikan Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan kerangka berpikir yang digunakan adalah induktif dan deduktif.

Sesuai dengan fokus masalah, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (Neuman, 2000; Sarantakos, 2002; Lincoln & Denzin, 2000; Silverman 1997; Silverman 1993; Creswell, 1994). Ciri lainnya, data penelitian yang berupa wacana (*discourse*) dan proses analisisnya dilakukan melalui interpretasi terhadap wacana, sebagaimana dijelaskan Thompson (2003) bahwa kajian terhadap ideologi hanya bisa dilakukan secara efektif melalui interpretasi. Selain itu, Thompson (2003:158) juga menyatakan bahwa analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan metode analisis tentang ideologi; yang dalam penelitian ini berupa ideologi pendidikan nasional Indonesia.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersumber pada teks produk undang-undang, sedangkan teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data interpretasi elite pendidikan sebagai narasumber. Wawancara dilakukan untuk memahami interpretasi elite pendidikan Indonesia tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (Gorden, 1969; Burgess, 1982; Patton, 1980). Untuk menjaga kredibilitas penelitian. Lincoln dan Guba (1985:300) mengemukakan empat kriteria yaitu melalui (*credibility transferability, dependability, dan confirmability*).

Dengan mengacu pada Putnam (1976), penetapan subjek sebagai narasumber/informan sebagaimana tampak dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Posisi Narasumber Penelitian

ELITE PENDIDIKAN	PENGAMBILAN KEPUTUSAN		DISTRIBUSI KEKUASAAN	
	STRA- TEGIS	NON- STRA- TEGIS	POSI- SIONAL	REPUTA- SIONAL
Elite Politik 1		✓		✓
Elite Politik 2		✓		✓
Elite Politik 3		✓		✓
Elite Politik 4	✓			✓
Elite Politik 5	✓		✓	
Elite Politik 6		✓	✓	
Elite Politik 7		✓	✓	
Elite Politik 8	✓		✓	
Elite Politik 9		✓		✓
Elite Politik 10	✓			✓

HASIL

Landasan Pendidikan Nasional

Komponen landasan pendidikan nasional terdapat 6 aspek penting meliputi: (1) dasar pendidikan, (2) fungsi dan tujuan pendidikan, (3) prinsip-prinsip pendidikan: pembudayaan dan keteladanan, (4) prinsip-prinsip pendidikan: demokratis dan pemberdayaan partisipasi masyarakat, (5) hak dan kewajiban warga negara, dan (6) hak dan kewajiban negara.

Aspek dasar pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan antara dasar negara dengan dasar pendidikan tidak banyak dipertanyakan oleh elit pendidikan Indonesia. Tidak banyaknya pertanyaan tentang perbedaan itu ada dua kemungkinan

penyebabnya. Pertama, adanya penyamaan antara dasar negara dengan dasar pendidikan. Kedua, adanya interpretasi penerapan dasar negara di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk pada aspek pendidikan. Berlandaskan kedua alasan tersebut dapat ditentukan bahwa pendidikan Indonesia menggunakan landasan nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, hakikat kehidupan yang tertata melalui nilai-nilai yang dianggap baik merupakan landasan pendidikan Indonesia.

Pada aspek kedua, fungsi dan tujuan pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut menjadi bagian dari landasan pendidikan. Dengan mengedepankan pembentukan watak dan peradaban bangsa menuju akhlak mulia, maka nilai menjadi penting dalam landasan pendidikan Indonesia. Selain itu, pendidikan Indonesia juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Rumusan ini mengimplikasikan bahwa pendidikan Indonesia juga menggunakan landasan pendidikan yang berupa pengembangan potensi peserta didik. Kedua aspek landasan tersebut bersifat oposisional, namun tampil dalam satu rumusan secara bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu saja, salah satu dari dua hal yang berposisi tersebut dipandang lebih penting. Menurut intepretasi elit pendidikan Indonesia, pengembangan potensi peserta didik yang ditujukan untuk perkembangan keimanan, ketaqwaan, dan kemuliaan akhlaknya dipandang lebih dominan daripada pembentukan pribadi yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Hak dan kewajiban warga negara dan hak dan kewajiban negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengimplikasikan hakikat warga negara dan negara dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagaimana interpretasi sebagian besar elit pendidikan di

Indonesia terhadap hak dan kewajiban warga negara, bahwa hakikat warga negara dalam bidang pendidikan di Indonesia merupakan subjek yang bebas menentukan pilihannya untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Akan tetapi, hal itu tidak sama dengan hakikat negara dalam bidang pendidikan di Indonesia yang tampak selalu mengatur dunia pendidikan di mana-mana. Di samping itu, sistem pendidikan Indonesia juga tidak mengarahkan pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai hakikat individu.

Ide-ide dalam komponen landasan pendidikan yang berbasis pada pengembangan peserta didik secara optimal yang diikuti dengan nilai-nilai dan watak bangsa tidak memungkinkan pendidikan untuk mengembangkan hakikat individualitas peserta didik. Sebaliknya, landasan pendidikan yang berisi penanaman nilai-nilai keberimanan, ketaqwaan, dan kemuliaan akhlak yang disertai pengembangan potensi peserta didik secara optimal juga tidak memungkinkan pengembangan pribadi peserta didik sesuai hakikat individualitas. Dengan ringkas bisa dikatakan bahwa landasan pendidikan Indonesia adalah tatanan sosial agama dan sekaligus tatanan sosial kultural.

Kurikulum Pendidikan Nasional

Aspek-aspek dalam komponen kurikulum pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi: (1) penetapan standar nasional pendidikan oleh pemerintah, (2) pengembangan kurikulum mangacu SNP, (3) diversitas kurikulum sesuai jenjang pendidikan, (4) penyusunan kurikulum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (5) muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah, (6) muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi, (7) penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah, (8) diversitas pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di bawah koordinasi dan supervisi negara, (9) pengembangan pendidikan tinggi mengacu standar nasional pendidikan, (10) pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi mengacu standar nasional pendidikan, (11) evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik.

Aspek penetapan standar nasional pendidikan oleh pemerintah pada komponen kurikulum pendidikan diinterpretasikan oleh para elit pendidikan di Indo-

nesia sebagai pemberian rambu-rambu atas diversitas kurikulum di tingkat lokal dan setiap satuan jenjang pendidikan. Dengan interpretasi semacam itu, maka sistem pendidikan Indonesia berdasarkan aspek ini mengindikasikan pemberian kebebasan tetapi juga dibarengi dengan keterikatan. Pemberian kebebasan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan potensi lokal serta satuan jenjang pendidikan membawa konsekuensi pada diversitas kurikulum, sedangkan acuan standar nasional pendidikan membawa konsekuensi keseragaman dan unitas kurikulum.

Penjelasan hal di atas selaras dengan aspek kedua dan ketiga yaitu pengembangan kurikulum mangacu SNP dan diversitas kurikulum sesuai jenjang pendidikan. Ini berarti adanya pemberian kebebasan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan potensi lokal dan satuan jenjang pendidikan yang menjadi isu penting pendidikan di Indonesia era reformasi. Akan tetapi, adanya acuan berupa standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan pemerintah untuk dijadikan pedoman pengembangan kurikulum pendidikan di daerah dan satuan pendidikan, mengindikasikan praktik pendidikan yang terpusat. Dengan demikian, kebebasan yang diberikan kepada daerah/lokal untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tetap "dibelenggu" dengan ketentuan dari pusat yang disebut standar nasional pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah menunjukkan masuknya kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Ini juga menunjukkan kuatnya dominasi negara dalam praktik pendidikan di Indonesia seperti yang terjadi pada masa rezim orde baru yang otoritarian. Masuknya kekuasaan negara ke dalam kurikulum pendidikan nasional juga tampak pada aspek pengawasan. Sistem pendidikan Indonesia yang memberikan kemungkinan terjadinya diversitas kurikulum, dari pendidikan dasar dan menengah sampai dengan pendidikan tinggi ternyata masih harus tunduk pada koordinasi dan supervisi negara. Diversitas pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah menunjukkan adanya alam kebebasan untuk dikembangkan apa saja dan bagaimana saja, tetapi dengan berada di bawah koordinasi dan supervisi negara tampak menonjolnya kekuasaan negara terhadap dunia pendidikan. Pada tingkat pendidikan tinggi, kuatnya dominasi negara dalam pendidikan juga tampak, di samping kebebasan yang juga diberikan. Di satu

sisi, pendidikan tinggi memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan ciri masing-masing, tetapi di sisi yang lain, pengembangan pendidikan tinggi itu tetap mengacu pada standar nasional pendidikan, sedangkan aspek pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi mengacu standar nasional pendidikan. Kendatipun pendidikan tinggi diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya, tetapi tidak bisa meninggalkan peranan negara sebagai pemroduk standar nasional pendidikan yang harus diacu.

Pada komponen kurikulum sistem pendidikan Indonesia ada yang memberikan kebebasan penuh pada daerah, sekolah, dan guru terletak pada aspek evaluasi hasil belajar. Pada aspek evaluasi hasil belajar ini dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam evaluasi hasil belajar peserta didik mengimplikasikan pemberian kebebasan penuh. Hal semacam ini tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya; cengkeraman orde baru terhadap dunia pendidikan tampak sekali pada aspek ini. Sebagaimana tercantum dalam Bab XII Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.

Berdasarkan 11 aspek dalam komponen kurikulum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan Indonesia sebagaimana yang diinterpretasikan oleh elit pendidikan Indonesia menunjukkan pemberian kebebasan kepada daerah, sekolah, dan guru, tetapi juga mengikatnya dengan standar nasional pendidikan.

Aspek-aspek dalam komponen kurikulum pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbagi atas 2 kategori, yaitu kategori mengenai isi kurikulum dan kategori manajemen kurikulum. Pada isi kurikulum tidak tampak banyak perubahan dibanding kurikulum sebelumnya, karena secara substantif tetap meliputi nilai-nilai dan seni serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada manajemen kurikulum dengan adanya diversitas kurikulum terdapat perubahan yang relatif radikal, karena sejak adanya Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia belum pernah ada diversi-

tas penyusunan kurikulum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Dengan lebih dominannya perubahan pada manajemen kurikulum daripada isi kurikulum ini, pada komponen kurikulum pendidikan mengindikasikan dimulainya babak baru pendidikan nasional yang lebih bernuansa lokal, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah dan guru.

Manajemen Pendidikan Nasional

Aspek-aspek dalam komponen manajemen pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi (1) pengembangan tenaga pendidik diatur dengan undang-undang, (2) penyediaan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan, (3) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, (4) evaluasi pendidikan dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi, (5) badan hukum pendirian satuan pendidikan, (6) pengawasan dan penyelenggaraan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas diatur oleh pemerintah.

Pada aspek pengembangan tenaga pendidik, bahwa pengembangan tenaga pendidik diatur dengan undang-undang. Aspek ini banyak diinterpretasikan oleh elit pendidikan Indonesia sebagai bentuk pengaturan pusat; dan rumusan yang demikian ini mereka terima. Dengan mengatur tenaga pendidik, yang bisa dimaknakan sebagai adanya dominasi negara terhadap tenaga pendidik, maka elit pendidikan Indonesia memandang aspek ini merupakan bentuk konservatifisme pemerintah pusat terhadap daerah. Dalam aspek ini pun, elit pendidikan Indonesia menyetujuinya.

Pada aspek penyediaan sarana dan prasarana, dinyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan. Rumusan ini kurang disetujui oleh elit pendidikan di Indonesia karena rumusan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai lepas tangan negara pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Memberikan peran kepada satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan memang bisa dibenarkan sehingga elit-elit pendidikan Indonesia menyetujui bila penyediaan sarana dan prasarana pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Apa yang dikehendaki oleh para elit pendidikan Indonesia pada aspek

ini juga banyak diilhami oleh aspek pendanaan pendidikan, yang dinyatakan dalam undang-undang bahwa aspek pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Aspek ini banyak diterima oleh elit pendidikan Indonesia. Pendanaan pendidikan yang hanya dibebankan kepada negara dipandang mengabaikan peran masyarakat; sebaliknya, menyerahkan pendanaan pendidikan kepada masyarakat dipandang sebagai pengingkaran tugas negara atas pendidikan, oleh karena itu, pendanaan pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat adalah rumusan yang bisa diterima.

Aspek keempat berkait dengan evaluasi pendidikan. Dinyatakan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi. Aspek ini ditanggapi secara beragam oleh elit pendidikan di Indonesia. Beberapa elit pendidikan tidak menyetujui, karena evaluasi pasar yang menentukan kelangsungan pendidikan, sedangkan elit pendidikan lainnya menyetujui evaluasi pendidikan dilakukan oleh pemerintah, dan sebagian diantaranya yang menyetujui dilakukan oleh pemerintah tetapi dilakukan oleh pihak independen. Dengan melihat komposisi interpretasi para elit pendidikan Indonesia terhadap aspek ini, maka adanya kecenderungan untuk membebaskan evaluasi dari otoritas negara.

Selanjutnya aspek badan hukum pendirian satuan pendidikan yang mengimplikasikan kuatnya otoritas negara ditanggapi positif oleh seluruh elit pendidikan di Indonesia. Dengan dasar bahwa negara Indonesia negara hukum, maka elit pendidikan Indonesia memandang pendirian satuan pendidikan harus berbadan hukum. Walaupun ada elit pendidikan Indonesia mempertaruhkan satuan pasar menjadi penentu kelangsungan pendidikan, tetapi dalam hal pendirian sekolah elit pendidikan itu tidak menyatakan bahwa hukum pasar merupakan legalisasi satuan pendidikan; elit pendidikan itu tetap menyandarkan pada legalitas hukum negara.

Aspek pengawasan dan penyelenggaraan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh pemerintah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan menunjukkan adanya indikasi berkurangnya otoritas negara dalam pengawasan pendidikan. Ini berbeda dengan aspek sanksi atau ketentuan pidana atas pelanggaran yang diatur pemerintah. Seperti halnya aspek legalitas hukum negara untuk pen-

dirian satuan pendidikan, aspek ini dilandasi bahwa negara Indonesia negara hukum, sehingga pelanggaran dalam dunia pendidikan harus diadili oleh hukum negara. Dengan demikian, dalam aspek ini, otoritas negara menjadi kuat.

Meski Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih banyak memberikan kebebasan dalam manajemen pendidikan, ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat juga masih tampak kental. Dalam keadaan yang demikian, kehadiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah membawa makna penting pada komponen manajemen pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua aspek yang menunjukkan hal itu adalah (1) aspek penyediaan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan dan (2) aspek pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kedua aspek ini cukup membawa konsekuensi mengubah manajemen pendidikan Indonesia yang telah ada sebelumnya. Dengan warna baru itu manajemen pendidikan Indonesia mengalami pembebasan, dalam arti memberikan kebebasan kepada setiap satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarannya sendiri dan juga menentukan kebutuhan anggarannya. Untuk mendukung pelaksanaan kedua aspek itu, perangkat manajemen telah disiapkan sebelumnya yaitu melalui bentuk manajemen berbasis sekolah (MBS) serta pembentukan organisasi komite sekolah dan dewan pendidikan.

Posisi Ideologi Pendidikan Indonesia dalam Rumpun, Model, dan Tipe Ideologi Pendidikan O'Neill

Pendidikan Indonesia: Konservatisme Sosial Revisionis

Landasan pendidikan Indonesia menunjukkan kesejajaran dengan model ideologi pendidikan konservatisme sosial O'Neill, yang menggabung dua tipe dalam model tersebut, yakni tipe konservatisme religius yang berlandaskan tatanan sosial agamis dan tipe konservatisme sekular yang berlandaskan tatanan sosial kultural. Komponen kurikulum juga menunjukkan kesamaan, walaupun juga terdapat perbedaan. Persamaannya, komponen kurikulum pendidikan Indonesia juga seperti tipe konservatisme religius yang berisi

pengetahuan agama, dan juga seperti tipe konservatisme sekular yang berisi nilai-nilai kultural. Perbedaannya, komponen kurikulum pendidikan Indonesia juga berisi pengetahuan ilmiah rasional dan teknologi. Komponen manajemen tampak kontras, konservatisme sosial O'Neill bermanajemen sentralistik, sedangkan manajemen pendidikan Indonesia desentralistik. Dengan persamaan dan perbedaan itu, maka ideologi pendidikan Indonesia dapat digolongkan pada model konservatisme sosial.

Model konservatisme dengan perbedaan pada komponen kurikulum dan manajemen seperti di atas, tidak terdapat dalam tipologi ideologi pendidikan O'Neill. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini tipe semacam itu disebut konservatisme revisionis. Konservatisme revisionis merupakan penggabungan tipe konservatisme religius dan konservatisme sekular dengan penambahan pada komponen kurikulum dan manajemen. Adanya penambahan itulah, maka pilihan label konservatisme revisionis ditetapkan. Walaupun ideologi pendidikan Indonesia termasuk dalam rumpun ideologi pendidikan konservatif, tidak sama dengan model konservatisme reaksioner (fundamentalisme) dan juga konservatisme intelektual (intelektualisme), yang kedua-duanya menaungi gerakan moral. Fundamentalisme dan intelektualisme yang senantiasa bertanding dalam memperjuangkan apa yang menjadi landasannya, tidak menunjukkan kemiripan dengan ideologi pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rumpun konservatif ideologi pendidikan Indonesia tergolong model konservatisme sosial. Akan tetapi, sekali lagi sebagai model konservatisme sosial tidak sama persis dengan tipologi O'Neill. Di samping menunjukkan penggabungan antara konservatisme sosial religius dan konservatisme sosial sekular, juga terdapat penambahan.

Tipe ideologi pendidikan Indonesia yang konservatisme sosial revisionis, di samping menambah tipologi ideologi O'Neill juga merevisi pandangan O'Neill tentang manajemen pendidikan yang berideologi konservatif. O'Neill memandang bahwa dalam pendidikan yang berideologi konservatif senantiasa menerapkan manajemen sentralistik dan mengisi kurikulum dengan agama dan nilai-nilai.

Pendidikan Indonesia: Liberalisme Kompromistik

Berdasarkan komponen manajemen yang desentralistik dan kurikulum yang berisi pengetahuan

ilmiah rasional dan teknologi (di samping pengetahuan agama dan nilai-nilai), maka ideologi pendidikan Indonesia menunjukkan kesamaan dengan ideologi pendidikan liberal O'Neill, lebih tepatnya model liberalisme. Sebagai ideologi pendidikan yang sekelompok dengan model liberalisme O'Neill, ideologi pendidikan Indonesia juga menunjukkan perbedaan. Perbedaannya adalah pada landasan dan kurikulum. Pada landasan, pelestarian dan perbaikan tatanan sosial dilakukan melalui tatanan sosial agamis dan kultural. Oleh sebab itu, dalam isi kurikulum juga dimuat pengetahuan agama dan nilai-nilai kultural. Kedua pokok ini yang memberi warna yang berbeda dengan model liberalisme O'Neill. Walaupun demikian ideologi pendidikan Indonesia masih termasuk di dalam kelompok model tersebut, karena kesamaannya pada komponen manajemen dan sebagian kurikulum.

Pendidikan di Indonesia tidak memiliki landasan pembaruan atau perombakan tatanan politik seperti model ideologi pendidikan liberasionisme. Di samping itu, walaupun ada kesamaan dalam landasan berupa pengembangan individu pembelajar sesuai dengan potensinya masing-masing, tetapi tidak ada upaya melebur, mengganti, atau meniadakan sekolah, seperti model ideologi pendidikan anarkhisme. Oleh sebab itu, dalam rumpun ideologi pendidikan liberal, ideologi pendidikan Indonesia tidak tergolong model liberasionisme atau anarkhisme, tetapi termasuk liberalisme. Sebagai model liberalisme, ideologi pendidikan Indonesia tidak menunjukkan tipe ideologi pendidikan liberalisme metodis, direktif, ataupun non-direktif. Perbedaan dengan ketiganya terdapat pada komponen landasan dan kurikulum. Pada komponen landasan kendatipun pelestarian dan perbaikan tatanan sosial menunjukkan kesamaan, tetapi tatanan sosial yang dimaksud berbeda. Tatanan sosial dalam ideologi pendidikan Indonesia adalah tatanan sosial agamis dan tatanan sosial kultural. Sedangkan pada komponen kurikulum pada ketiga tipe ideologi pendidikan liberalisme tersebut hanya berisi pengetahuan ilmiah-rasional. Hal itu berbeda dengan komponen kurikulum pendidikan Indonesia yang berisi agama, nilai-nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh sebab itu, dalam rumpun liberal, ideologi pendidikan Indonesia termasuk model liberalisme bertipe liberalisme kompromistik. Label kompromistik diambil, karena adanya variasi pengurangan dari model liberalisme pada komponen landasan dan kurikulum.

Ideologi Pendidikan Indonesia berdasarkan Kategori Elite Pendidikan Indonesia

Dari 10 orang Elite Pendidikan Indonesia yang menginterpretasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hasil interpretasinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) kategori Elite Pendidikan Strategis dan Elite Pendidikan Posisional, menginterpretasi bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional termasuk ideologi pendidikan konservatif revisionis; merupakan penggabungan tipe ideologi konservatisme religius dan konservatisme sekular dengan penambahan pada komponen kurikulum dan manajemen, (2) kategori Elite Pendidikan Non Strategis dan Elite Pendidikan Reputasional, menginterpretasi bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional termasuk ideologi pendidikan liberal kompromistis; karena terdapat pengurangan "kadar" model liberalisme pada komponen landasan dan kurikulum. Pendidikan Nasional Indonesia masih menggunakan landasan pelestarian tatanan agama dan sosiokultural dan masih menerima kehadiran agama dan nilai dalam kurikulum. Ideologi pendidikan Liberal kompromistis mendasarkan pada komponen manajemen yang desentralistik dan kurikulum yang berisi pengetahuan ilmiah rasional dan teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Interpretasi Elite Pendidikan Indonesia tentang landasan pendidikan nasional berdasarkan persepektif O'Neill, bercirikan ideologi pendidikan konservatif sosial dan sekaligus bercirikan ideologi liberal. Disebut bercirikan ideologi pendidikan konservatisme sosial karena di dalam landasan pendidikan berisikan nilai-nilai agamis dan kultural, kebudayaan dan keteladanan, serta masih dominannya peran negara terhadap pendidikan. Disebut bercirikan ideologi pendidikan liberal, karena di dalam komponen berisikan pengembangan potensi peserta didik melalui ilmu pengetahuan, kebebasan warganegara secara demokratis, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Menurut interpretasi para Elite Pendidikan Indonesia komponen kurikulum pendidikan nasional baik isi kurikulum maupun pengelolaannya masih menim-

bulkan dualisme yang oposisional. Artinya di dalam rumusan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam komponen isi dan pengelolaan kurikulum sistem pendidikan nasional terkandung ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif dan liberal. Dengan kata lain kurikulum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki ciri-ciri ideologi Konservatif dan Liberal.

Menurut interpretasi para Elite Pendidikan Indonesia komponen manajemen pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengandung ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif dan liberal.

Berdasarkan interpretasi Elite Pendidikan Indonesia terhadap komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional, dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O'Neill, ideologi pendidikan Indonesia bisa disebut sebagai ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan sekaligus bisa disebut pula ideologi liberalisme kompromistik. Disebut demikian karena ideologi pendidikan Indonesia dapat memasuki di kedua rumpun ideologi pendidikan sebagaimana yang diklasifikasi oleh O'Neill, dengan revisi dan kompromi. Disebut Ideologi Pendidikan Indonesia termasuk konservatisme sosial revisionis, berangkat dari interpretasi elit pendidikan Indonesia terhadap komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional, dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O'Neill, mengandung ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif sosial, dengan melakukan revisi berupa penambahan ciri-ciri ideologi pendidikan liberal. Disebut Ideologi Pendidikan Indonesia termasuk liberal kompromistis, berangkat dari interpretasi Elite Pendidikan Indonesia terhadap komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional, dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O'Neill, mengandung ciri-ciri ideologi pendidikan liberal, dengan melakukan kompromi berupa penambahan ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif, atau pengurangan "kadar" model liberalisme.

Saran

Implikasi teoretis berdasarkan dari hasil penelitian dalam tulisan ini adalah menolak pendekatan analisis monolitik, dikotomi tipe ideologi pendidikan, dan linearitas komponen-komponen ideologi pendidikan O'Neill, dan menerima pendekatan dialektik Nelson. Penolakan dan penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. O'Neill (1981) menggunakan pendekatan analisis monolitik dalam usaha mengelompokkan ideologi pendidikan menjadi dua rumpun ideologi yang terpisah yaitu rumpun ideologi pendidikan konservatif dan liberal. Pendekatan monolitik O'Neill (1981) tidak melihat pada komponen kurikulum dan manajemen pendidikan, sehingga ideologi pendidikan sebagai representasi politik pendidikan tidak tampak. Dengan dasar itu maka pendekatan dialektik Nelson, dkk. (1996), lebih tepat untuk menyelami ideologi pendidikan dan juga politik pendidikan, di bandingkan pendekatan monolitik O'Neill. Berdasarkan hasil penelitian ini maka ke depan, untuk mengkaji ideologi pendidikan sebagai representasi politik pendidikan, pendekatan monolitik yang hanya menyandarkan satu komponen tidak dapat dipertahankan lagi. Ke depan, pendekatan yang lebih tepat untuk menganalisis ideologi pendidikan menggunakan pendekatan dialektik seperti disarankan oleh Nelson, dkk. (1996) yang menyandarkan pada tiga (3) komponen ideologi pendidikan, yakni (1) landasan, (2) kurikulum, dan (3) manajemen pendidikan.

Demikian halnya dengan, pandangan O'Neill (1981) yang menentukan antara model ideologi pendidikan konservatisme sosial religius dan model ideologi pendidikan konservatisme sosial sekular bersifat dikotomis, tidak tepat. Karena hal semacam itu tidak terjadi pada liberalisme kompromistik yang memadu antara liberalisme metodis dan liberalisme direktif yang memang tidak dikotomis. Adanya temuan tipe ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan liberalisme kompromistik juga menunjukkan ketidaklinearan komponen-komponen ideologi pendidikan yang membentuk tipe ideologi tersebut. Ketidaklinearan itu berarti menolak pandangan O'Neill (1981) yang mengakui bahwa komponen-komponen ideologi pendidikan yang membentuk tipe ideologi pendidikan tertentu selalu linear, dan linieritasnya ditentukan oleh komponen landasan pendidikannya.

Temuan berupa konsep tipe ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan ideologi pendidikan

an liberalisme kompromistik, keduanya menunjukkan adanya proses denasionalisasi sistem pendidikan Indonesia sejalan dengan pandangan Nelson, dkk. (1996:249) mengenai prinsip demokratisasi dan pemberdayaan, diversitas pengembangan kurikulum nasional yang harus memelihara kepentingan lokal (*maintaining local interest*), dan manajemen pendidikannya lebih bersifat desentralistik. Hal yang demikian juga terdapat dalam sistem pendidikan di negara-negara persemakmuran (Inggris, Australia, dan Kanada).

Tipe ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan ideologi pendidikan liberalisme kompromistik, keduanya tidak termasuk golongan ideologi pendidikan kritis karena keduanya tidak menunjukkan adanya gerakan-gerakan merubah tatanan politik. Tidak seperti halnya gerakan-gerakan perubahan yang ditampilkan oleh tipe ideologi pendidikan fundamentalis, intelektualis, liberasionis, maupun anarkhisme yang dikemukakan O'Neill. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tipe ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan ideologi pendidikan liberalisme kompromistik adalah depolitik. Depolitik ini bertentangan dengan ide politik pendidikan kritis, seperti politik pendidikan Freire (2004) atau peniadaan sekolah Illich (1971/2000). Depolitisasi itu, juga bertentangan dengan model ideologi pendidikan liberasionisme yang diterapkan pada sistem pendidikan Mesir dan Belanda, karena di kedua negara itu sistem pendidikan ditujukan untuk melakukan perubahan tatanan politik. Sistem pendidikan Mesir bertujuan penegakan demokrasi dan pembentukan individu yang demokratis, sedangkan sistem pendidikan Belanda bertujuan untuk pembaruan tatanan politik. Depolitik pendidikan Indonesia juga bertentangan ideologi pendidikan fundamentalisme seperti yang dipraktikkan di Cina, Kuba, Arab, Iran, Korea Selatan, dan Perancis. Sistem pendidikan di Cina bertujuan untuk perbaikan tatanan sosial sesuai dengan pembangunan sosialis, dan sistem pendidikan Kuba yang bertujuan untuk perbaikan tatanan sosial sesuai dengan nilai dan budaya komunis, Arab dan Iran yang bertujuan untuk pengembangan potensi individu sesuai dengan nilai agama dan budaya Islam, sistem pendidikan di Korea Selatan dan Perancis yang bertujuan untuk pengembangan nasionalisme.

Dasar dan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat baku, tetap dan tidak berubah. Merubah dasar negara dan falsafah

negara berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ideologi pendidikan dapat berubah, bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, sesuai dengan hakekat suatu ideologi pendidikan bersifat dinamis dan kontekstual relevan dengan kebutuhan (berbeda dengan falsafah dan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang tetap) ke depan sistem pendidikan nasional hendaknya berideologi pendidikan kontekstual, berpolitik, mengambil jalur pendidikan kritis, yang menampilkan gerakan yang pasti. Pendidikan kritis yang menampilkan gerakan yang pasti harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, dalam usaha untuk melakukan perbaikan tatanan politik yang lebih berpihak kepada masyarakat untuk menggapai kesejahteraan yang berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bowles, G. and Fidler B. Eds. 1989. *Effective Local Management of Schools: A Strategic Approach*. London: Longman.
- Bowles, Samuel dan Gintis, Herbert. 2003. *Pendidikan revolusioner dalam Freire, Illich, Fromm*. 2003. *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis Konservatif, Liberal, Anarkhis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brameld, Theodore B. 1950. *Patterns of Educational Philosophy: A Democratic Interpretation*. New York: World Book Company.
- Brameld, Theodore B. 1961. *Cultural Foundations of Education*. New York: Harper & Row Publishers, Incorporated
- Brameld, Theodore B. 1955. *Philosophy of Education in Cultural Perspective*. New York: The Dry Press, Inc.
- Brameld, Theodore B. 1960. *The Philosophy of Education as The Philosophy of Politics*. New York: Harper & Row Publishers, Incorporated.
- Brown, G. and Yule, G. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brubacher, S., John. 1978. *Modern Philosophies of Education*. New York: Printed in India by Arrangement with McGraw-Hill, Inc.
- Burgess, R.G. ed. (1982). *Field Research: A Source Book and Field Manual*. London: Allen & Unwin.
- Butler, J. Donald. 1967: *Four Philosophies of Education and Their Practice in Education and Religion*. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.
- Coleman, J.S. 1973. "Equality of Opportunity and Equality of Results". Dalam *Harvard Educational Review*, Volume 43.
- Creswell, W. John. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California, Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- Counts, S. George, 2003. *Beraniakah Sekolah Membangun Tatanan Sosial Baru dalam Freire, Illich, Fromm*. 2003. *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis Konservatif, Liberal, Anarkhis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, Robert A. 1978. *Modern Political Analysis*. Third ed. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Danim, Sudarwin. 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. ed. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Second edition. London: Sage Publications, Inc.
- Depdikbud. 1989. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Depdiknas. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pikiran Pembaruan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional.
- Dewey, John 19. *Reconstruction in Philosophy*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Dewey John. 2003. "Anak versus Kurikulum". Dalam Paulo Freire, Illich, dan Erich Fromm. 2003. *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkhis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erich Fromm. 2003. "Mendidik si Automatom", John Dewey. 2003.
- Fairclough, N. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fey, J.T. 1985. "System of Education of Federal Republic of Germany". In Husen, F, and Postlethwaite, N.T.

- (Eds.), *International Encyclopedia of Education*, New York: Pergamon Press.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings, 1972-1977* (edited by Colin Gordon). Brighton: Penguin Books.
- Foucault, Michel. 1990. *History of Sexuality*. London: Penguin Books.
- Freire, Paulo. 2001. *Pedagogi Pengharapan: Menghayati Kembali Pedagogi Kaum Tertindas*. Terj. Yogyakarta: Kanisius.
- Freire, Paulo, dkk. 2003. *Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkhis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. 2004. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Ke-kuasaan dan Pembebasan*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giroux, A. Henry and Peter MacLaren. 1989. *Critical Pedagogy The State and Cultural Struggle*. New York: State University of New York Press.
- Gorden, R.L. 1969. *Interviewing: Strategy, Techniques, and Tactics*. Homewood Dorsey Press.
- Halls, W.D. 1995. "Education System of the United Kingdom". Dalam Postlethwaite, T. Neville, *The International Encyclopedia of National System of Education* (2nd ed.). New York: Elsevier Science Inc.
- Haralambos, Michel and Martin Holborn. 2000. *Sociology: Themes and Perspectives (fifth edition)*. London: Harper Collins Publishers Limited.
- Henry, A. Giroux, 1993. *Border Crossing: Cultural Workers and Politics of Education*. New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc.
- Hoffman, Robert. 2003. *Anarkhisme dalam Freire, Illich, Fromm*. 2003. *Menggugat Pendidikan; Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkhis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Illich, Ivan. 2000. *Deschooling Society* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor.
- Illich, Ivan. 2002. *Celebration of Awareness: A Call for Institutional Revolution* (terjemahan). Yogyakarta: Ikon Teralitera. International association for evaluation achievement/iaea, 1991).
- Lincoln, Y., & Denzin, Norman, K. 2000. *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. London, New Delhi: SAGE Publications, Inc.
- Lincoln, Y. & Egon Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publications, Inc.
- Nelson, L. Jack. Dkk. 1996. *Critical Issues In Education; A dialectic Approach*, Third Edition New York; The McGraw-Hill Company, Inc.
- O'Neil F., William, 1981. *Educational Ideologies; Contemporary Expressions of Educational Philosophies*. Santa Monica, California: Goodyear Publishing Company.
- Patt, Yimmy dan Lody Patt, 2008. *Pendidikan Guru dan Neo Liberalisme* (makalah) disampaikan dalam Diskusi Bulanan Kelompok Studi Kultural dan Pedagogik, Jakarta, 13 November 2008.
- Patton M.Q. 1980. *Qualitative Evaluation Methods* (2nd ed). California: Sage Newbury Park.
- Silverman, David. 1997. *Qualitative Reseach; Theory, Method, and Practice*, London: Sage Publications, Inc.
- Silverman, David. 1993. *Interpreting Qualitative Data; Methods for Analizing Talk, Teks, and Interaction*. London, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
- Van Dijk, Teun A. (ed). 1985a. *Handbook of Discourse Analysis (volume I): Disciplines of Dicourse*. London: Academic Press.
- Van Dijk, Teun A. (ed). 1985b. *Handbook of Discourse Analysis (volume II): Dimensions of Dicourse*. London: Academic Press.
- Van Dijk, Teun A. (ed). 1985c. *Handbook of Discourse Analysis (volume III): Dicourse of Dialogue*. London: Academic Press.
- Van Dijk, Teun A. (ed). 1985d. *Handbook of Discourse Analysis (volume IV): Dicourse Analysis in Society*. London: Academic Press.